

ANALISIS KINERJA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

¹Agustina Kopong, ²Corvis L Rantererung, ³Kristian HP Lambe
^{12,3}Universities Kristen Indonesia Paulus
agustinakopong87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan fokus penelitian pada Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah pada 8 orang pegawai sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peranan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. APIP dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang independen, membantu menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di Provinsi Papua Tengah. Kinerja yang optimal dari APIP akan berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Faktor-faktor pendukung yang mencakup kecukupan anggaran, SDM yang memadai, sarana dan prasarana, komitmen pimpinan, serta fasilitas dan tunjangan yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Faktor-faktor penghambat kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, seperti kurangnya kompetensi SDM, budaya organisasi yang tidak mendukung, motivasi yang rendah, dan keterbatasan jumlah auditor, sangat mempengaruhi kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif.

Kata kunci: Kinerja, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Inspektorat

ABSTRACT

This study focuses on the object of research at the Inspectorate of Central Papua Province, specifically on the performance of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the Inspectorate of Central Papua Province. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) plays a strategic role in ensuring accountability and transparency in the management of regional finances and resources. This study aims to assess and analyze the performance of the Government Internal Supervisory Apparatus at the Inspectorate of Central Papua Province. The research object is located at the Inspectorate of Central Papua Province. This type of research employs a qualitative approach. The data sources include primary and secondary data. Data collection methods consist of observation, interviews with informants, and documentation. The informants in this study are 8 (nine) employees at the Inspectorate of Central Papua Province who serve as members of the Government Internal Supervisory Apparatus. The data analysis method used is qualitative descriptive analysis, which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study concludes that the performance of APIP at the Inspectorate of Central Papua Province plays a crucial role in ensuring good, accountable, and transparent governance. APIP serves as an independent control mechanism, helping to create effective, efficient, and accountable governance in Central Papua Province. Optimal performance from APIP will contribute to the improvement of governance and public trust in governmental institutions. Supporting factors, including adequate budgeting, sufficient human resources, facilities and infrastructure, leadership commitment, and good benefits and allowances, significantly influence the performance of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at

the Inspectorate of Central Papua Province. Conversely, factors hindering APIP's performance at the Inspectorate of Central Papua Province, such as a lack of human resource competence, a non-supportive organizational culture, low motivation, and a limited number of auditors, greatly affect APIP's ability to carry out supervisory tasks effectively.

Keywords: *Performance, Government Internal Supervisory Apparatus, and Inspectorate.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Inspektorat Provinsi Papua Tengah, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah. Tugas utama Inspektorat meliputi: Melakukan audit keuangan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel; Mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku (Mangallo & Lambe, 2025); Menyusun laporan hasil audit dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang diaudit; Melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah di daerah. Inspektorat Provinsi Papua Tengah dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Di bawah Inspektur, terdapat beberapa pejabat dan staf yang membagi tugas berdasarkan bidang-bidang tertentu, seperti audit keuangan, pengawasan kinerja, dan pengawasan khusus. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara rinci dan lengkap dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER.1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sub unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal yang Efektif (unsur lingkungan pengendalian). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dalam upaya penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP maka menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal dilakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pada Peraturan Menteri Negara Perdaganggunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya juga dijelaskan bahwa APIP melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. Dalam Peraturan Pemerintah terbaru, Inspektorat kabupaten/kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur (aturan lama diangkat oleh Sekretaris Daerah) dan Inspektorat di tingkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan (Idana, Lestari, Mandalika, & Putri, 2022). Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah. Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara rinci dan lengkap dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER.1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sub unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal yang Efektif (unsur lingkungan pengendalian). Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan fokus penelitian pada Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah.

Di Indonesia, Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan intern berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah (Fauzi, 2016). Di Provinsi Papua Tengah, tugas ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi. Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah yang memiliki karakteristik unik, termasuk keragaman budaya, kondisi geografis yang sulit, dan tingkat pembangunan yang bervariasi. Dengan luas wilayah yang signifikan dan aksesibilitas yang terbatas, pelaksanaan pengawasan intern menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pengawasan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern, terutama dalam hal kecepatan dan kualitas laporan audit, serta tindak lanjut terhadap temuan audit. Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, dan kinerja aparat pengawasan intern menjadi salah satu indikator penting dalam menilai integritas serta efektivitas pemerintahan. Namun, meskipun peran penting Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kinerja mereka. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dukungan teknologi informasi yang minim, serta rendahnya koordinasi dengan instansi lain. Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencerminkan sejumlah fenomena yang menggambarkan tantangan dan dinamika dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Beberapa fenomena yang terjadi dalam pengawasan intern di Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu fenomena yang menonjol adalah tingkat kualitas audit yang beragam. Variasi dalam kualitas audit ini terlihat dari adanya laporan yang jelas dan tepat, sementara yang lain cenderung kurang mendetail serta tidak memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan. Faktor yang memengaruhi hal ini antara lain kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pengawasan. Selain itu, tindak lanjut terhadap temuan audit juga tidak optimal. Meskipun laporan audit telah dihasilkan, banyak rekomendasi yang tidak diimplementasikan oleh instansi yang diaudit, sehingga potensi perbaikan tidak dapat tercapai dan menimbulkan kesan bahwa pengawasan tidak efektif.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, di mana jumlah tenaga pengawas yang kompeten masih kurang. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja berlebihan pada sejumlah kecil pegawai, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas pengawasan. Kesulitan akses geografis juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan pengawasan. Wilayah Papua Tengah yang luas dan memiliki medan yang sulit dijangkau menyebabkan keterbatasan aksesibilitas, sehingga pengawasan terhadap program pemerintah di daerah terpencil menjadi tidak menyeluruh.

Selain itu, tingkat transparansi dan partisipasi publik yang rendah turut menjadi kendala dalam pengawasan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat mengurangi akuntabilitas serta membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemanfaatan teknologi yang masih minim juga memperburuk keadaan. Meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengawasan, penggunaannya dalam proses audit dan pengawasan di Inspektorat masih terbatas, sehingga pengumpulan data yang akurat serta analisis yang mendalam menjadi sulit dilakukan.

Tidak hanya aspek teknis, tantangan budaya dan sosial juga memengaruhi efektivitas pengawasan. Keberagaman budaya serta kondisi sosial ekonomi di Papua Tengah sering kali memengaruhi pola interaksi antara aparat pengawasan dan masyarakat. Norma-norma sosial yang ada terkadang menghambat pelaksanaan pengawasan yang objektif dan independen. Di sisi lain, dukungan kebijakan yang belum optimal semakin memperumit tugas pengawasan. Kebijakan yang ada sering kali tidak didukung oleh alokasi anggaran maupun infrastruktur yang memadai, sehingga aparat pengawasan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Fenomena-fenomena ini menggambarkan kompleksitas yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan intern. Memahami fenomena-fenomena ini penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja aparat pengawasan dan mendukung akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Fenomena ini menuntut adanya analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja aparat pengawasan intern serta merumuskan strategi untuk meningkatkannya.

Pada penelitian sebelumnya (Putri Yuliawati, 2022) Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. *The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (Ciastech 2022)*P-ISSN : 2622-1276.E-ISSN:2622-1284. Penelitian ini menyimpulkan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten Blitar memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup baik material maupun non material dalam melaksanakan tugas dan memiliki Anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Program-Program Kegiatan. Proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala inspektorat dalam melakukan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Blitar. Inspektorat terus memantau berbagai proses dan tindak lanjut dari hasil pengawasan terkait pelaksanaan *good governance*. Adapun hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Blitar yaitu meliputi terbatasnya sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas Pegawai terkait auditor, sampai dengan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah, peneliti hendak melakukan kajian terkait Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah pada 8 orang pegawai sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini terkait tentang Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugasnya di Intern Pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, faktor pendukung Kinerja Aparat Pengawasan Intern (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dan faktor penghambat Kinerja Aparat Pengawasan Intern (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, yang diuraikan sebagai berikut:

Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugasnya di Intern Pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting dalam menjalankan tugasnya di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi dan operasional pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, APIP berfungsi sebagai pengawas internal yang mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran, dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintah (Mangallo & Lambe, 2025).

APIP memiliki beberapa fungsi kunci yang mendasari kinerjanya, antara lain:

1. APIP bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap semua aktivitas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, termasuk pengelolaan anggaran dan sumber daya. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang ada.
2. Audit dan Evaluasi, melalui audit dan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan kegiatan, APIP dapat memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan dalam pemerintahan adalah efektif dan efisien. Laporan hasil pengawasan yang disusun akan digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah.
3. Pencegahan Korupsi dimana salah satu tujuan utama APIP adalah untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, APIP dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah di masa mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022, tugas APIP meliputi:

1. Membantu Gubernur. APIP membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Pengawasan Rutin. APIP melaksanakan pengawasan secara rutin setiap tahun terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan ini dituangkan dalam Program Kerja dan disusun berdasarkan tingkat risiko SKPD dalam mengelola anggaran.
3. Deteksi Dini. Melalui kegiatan reviu dan monitoring, APIP dapat melakukan deteksi dini sebelum terjadinya penyimpangan dari peraturan yang ada.

Kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis bagi pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan. Fungsi dan tugas APIP di wilayah ini tidak hanya mengawasi ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini mencakup pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan administrasi pemerintahan. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, APIP dapat Menjamin Kepatuhan Hukum dan dapat memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga mengurangi risiko pelanggaran

dan penyimpangan. Dengan melakukan audit dan evaluasi secara rutin, APIP berfungsi sebagai penghalang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Ibrahim & Idris, 2025). Deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dapat mencegah terjadinya kerugian negara. Salah satu tugas utama APIP adalah melakukan audit dan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pemerintahan. APIP melakukan audit terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif. Audit ini juga mendukung akuntabilitas dengan memberikan laporan yang transparan tentang penggunaan anggaran. Selain audit keuangan, APIP juga mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh SKPD. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah tujuan program tercapai dan apakah langkah-langkah perbaikan diperlukan.

Setelah melakukan audit dan evaluasi, APIP menyusun laporan hasil pengawasan yang berisi rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi ini sangat penting, sebab dengan memberikan masukan yang konstruktif, APIP membantu SKPD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugasnya. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa perubahan kebijakan, perbaikan prosedur, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. APIP melakukan Perbaikan Sistem Pengelolaan pada laporan hasil pengawasan juga digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi. Dengan demikian, APIP berkontribusi pada penguatan tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pengawasan lainnya. APIP memberikan pelatihan yang diperlukan bagi SDM di lingkungan pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas pengawasan (Firmansyah, 2025). APIP Mendorong Pembelajaran Berkelanjutan dengan adanya pelatihan dan pengembangan, aparat pengawasan dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, sehingga pengawasan internal dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa cara yang dilakukan APIP untuk mencapai hal ini antara lain:

1. Publikasi Laporan: APIP menyusun laporan hasil pengawasan yang dapat diakses oleh publik. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Partisipasi Masyarakat: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, APIP dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan.

Untuk mencapai hal ini, perlu ada komitmen untuk meningkatkan kapabilitas APIP melalui:

1. Pelatihan dan Pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pengawasan lainnya agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.
2. Peningkatan Anggaran. Menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pelatihan.
3. Kolaborasi dengan Pihak Terkait. Membangun kemitraan dengan lembaga lain untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peranan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Meskipun terdapat tantangan signifikan yang dihadapi, seperti kekurangan SDM dan pembagian tugas yang tidak merata, peran APIP dalam mencegah penyimpangan dan praktik korupsi tetap sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapabilitas APIP dan memastikan bahwa pengawasan internal dapat dilakukan secara efektif. Dengan demikian, APIP dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang independen, membantu menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di Provinsi Papua Tengah.

Faktor pendukung Kinerja Aparat Pengawasan Intern (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Faktor-faktor ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang dilakukan oleh APIP.

Anggaran yang cukup merupakan salah satu faktor fundamental dalam mendukung kinerja APIP. Kecukupan anggaran pengawasan memungkinkan APIP untuk melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan, termasuk Pelaksanaan Audit dan Evaluasi, dengan anggaran yang memadai, APIP dapat melaksanakan audit dan evaluasi secara menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD (Artinah, 2018). Ini termasuk biaya pelaksanaan audit, penyusunan laporan, dan tindakan korektif yang diperlukan. Anggaran yang cukup juga memungkinkan APIP untuk mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi auditor, sehingga meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka.

Ketersediaan SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sangat berpengaruh terhadap kinerja APIP (Irawan, 2018). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya Kecukupan jumlah auditor sangat penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang perlu diawasi dapat dijangkau. Kekurangan jumlah auditor dapat mengakibatkan pengawasan yang tidak menyeluruh, kompetensi auditor juga sangat krusial. Auditor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung kinerja APIP (Damopolii, 2016). Sarana dan prasarana yang baik mencakup Peralatan dan Teknologi, Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan, seperti perangkat audit, sistem informasi manajemen, dan alat komunikasi, Ruang Kerja yang Nyaman, Ruang kerja yang baik dan fasilitas pendukung lainnya akan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas auditor dalam melaksanakan tugas mereka.

Dukungan dan komitmen dari pimpinan sangat penting untuk elancaran tugas APIP. Komitmen pimpinan dapat dilihat dari Pemberian Dukungan Moral dan Sumber Daya, Pimpinan yang memberikan dukungan moral dan sumber daya yang diperlukan akan memotivasi auditor untuk bekerja dengan lebih baik. Pengambilan Keputusan yang Mendukung dimana Pimpinan yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan pengawasan yang baik.

Beberapa dukungan kinerja yang berkontribusi pada efektivitas APIP diantaranya:

1. Kompetensi dan Komitmen Auditor dimana Kinerja APIP sangat bergantung pada komitmen auditor untuk melaksanakan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Auditor yang berdedikasi akan lebih proaktif dalam melakukan pengawasan.
2. Sikap Pimpinan. Sikap pimpinan yang mendukung, terbuka, dan responsif terhadap rekomendasi auditor akan meningkatkan efektivitas pengawasan.
3. Fasilitas yang memadai dan ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan pengawasan akan sangat membantu APIP dalam melaksanakan tugasnya. Fasilitas yang baik mencakup: Ruang Pelatihan: Fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor, seperti bimbingan teknis (bimtek) dan diklat (pendidikan dan pelatihan).
4. Dana Operasional. Dana yang cukup untuk mendukung operasional harian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Tunjangan Kinerja dan Gaji. Tunjangan kinerja yang tinggi dan gaji yang memadai menjadi faktor pendukung yang signifikan. Hal ini berkaitan dengan:

Kesejahteraan yang baik akan meningkatkan motivasi dan produktivitas auditor dalam melaksanakan tugas mereka. Tenaga APIP yang merasa dihargai cenderung lebih loyal dan berkomitmen tinggi terhadap pekerjaan mereka. Dalam situasi tertentu, tenaga APIP mungkin harus bekerja overtime. Dukungan berupa tunjangan lembur akan memberikan insentif tambahan dan mendorong auditor untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan tugas pengawasan.

Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur kinerja APIP juga merupakan faktor pendukung yang penting. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab APIP, auditor dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Faktor-faktor pendukung yang mencakup kecukupan anggaran, SDM yang memadai, sarana dan prasarana, komitmen pimpinan, serta fasilitas dan tunjangan yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Dengan adanya dukungan yang kuat dalam aspek-aspek tersebut, APIP dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Kinerja yang optimal dari APIP akan berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Faktor penghambat Kinerja Aparat Pengawasan Intern (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor ini dapat mengurangi efektivitas APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka. Berikut adalah pembahasan detail mengenai faktor-faktor penghambat tersebut:

1. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor utama yang menghambat kinerja APIP adalah kurangnya kompetensi SDM (Masdan, Ilat, & Pontoh, 2017). Banyak auditor di Inspektorat Provinsi Papua Tengah yang mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan audit dan pengawasan secara efektif. Kualitas yang rendah ini dapat mengakibatkan hasil pengawasan yang tidak akurat dan kurang bermanfaat. Faktor penghambat SDM dalam segi kualitas dan kuantitas masih kurangnya Tenaga fungsional Auditor/PPUPD yang belum memenuhi kebutuhan yang seharusnya, dimana kebutuhan Auditor seharusnya 79 orang dengan rincian : Ahli Utama 1 orang, Ahli Madya 6 orang, Muda 18 orang, Pertama 54 orang. Kebutuhan PPUPD seharusnya 37 orang dengan rincian : Ahli utama 2 orang, Ahli madya 5 orang, Muda 12 orang dan Pertama 18 orang. Keterbatasan jumlah tenaga auditor yang tersedia di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menjadi penghambat signifikan. Kebutuhan auditor seharusnya sebanyak 79 orang, namun jumlah yang tersedia jauh di bawah kebutuhan tersebut. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berlebihan bagi auditor yang ada, dan dapat mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal. Sehingga Pembagian tugas per wilayah Inspektorat yang belum merata menambah beban kerja dan dapat menyebabkan beberapa area tidak terawasi dengan baik.

2. Kurangnya Pengembangan Kapasitas.

Belum maksimalnya program pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM berkontribusi pada kurangnya keterampilan teknis dan pengetahuan terbaru dalam bidang audit dan pengawasan. Tanpa pengembangan kapasitas yang tepat, auditor tidak dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik pengawasan.

Budaya organisasi yang tidak sehat, seperti konflik antar pegawai atau kurangnya komunikasi yang baik, dapat menciptakan suasana kerja yang tidak produktif, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja APIP (Oktafien & Yuniarsih, 2018). Seringnya pergantian pegawai dapat mengganggu hubungan kerja yang sudah terjalin, dan mengurangi efektivitas tim dalam menjalankan tugas pengawasan sebab pegawai baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, yang dapat menghambat kelancaran proses pengawasan. Proses evaluasi yang tidak memadai dapat menghambat peningkatan kinerja APIP. Hal ini mencakup:

1. Kurangnya Tindak Lanjut yang menyebabkan rendahnya kepatuhan sebagian auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan menunjukkan bahwa tidak ada evaluasi yang cukup untuk memantau penerapan rekomendasi tersebut.
2. Tidak Ada Umpan Balik yang Konstruktif. Tanpa evaluasi kinerja yang teratur, auditor tidak mendapatkan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas mereka.

Disiplin terhadap jam kerja yang masih kurang di kalangan pegawai dapat mengganggu kinerja APIP (Ramadhani, Lituhayu, & Widowati, 2024). Hal ini bisa disebabkan oleh Kurangnya Pengawasan Jam Kerja. Tanpa pengawasan yang ketat pada jam kerjabida berdampak pada pegawai tidak mematuhi jam kerja yang ditentukan, yang berdampak pada produktivitas. Masih adanya Budaya Kerja yang Santai seperti budaya kerja di lingkungan Inspektorat tidak menekankan pentingnya disiplin, pegawai akan merasa tidak perlu untuk mematuhi ketentuan yang ada sehingga hal ini nantinya akan menghambat Kinerja Aparat Pengawasan Intern (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Ketidaktersediaan pelatihan dan kursus yang memadai untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan auditor juga menjadi faktor penghambat. Hal ini mengakibatkan Keterbatasan Pengetahuan, Auditor yang tidak mendapatkan pelatihan terbaru mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai praktik audit yang baik dan teknik pengawasan yang efektif. Keterbatasan dalam Inovasi, sebab Tanpa pelatihan yang tepat, auditor mungkin tidak dapat menerapkan pendekatan inovatif dalam pengawasan, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Faktor-faktor penghambat kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, seperti kurangnya kompetensi SDM, budaya organisasi yang tidak mendukung, motivasi yang rendah, dan keterbatasan jumlah auditor, sangat mempengaruhi kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi manajemen untuk meningkatkan pengembangan kapasitas SDM, menciptakan budaya organisasi yang positif, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan agar kinerja APIP dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, APIP dapat berfungsi dengan baik dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peranan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. APIP dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang independen, membantu menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di Provinsi Papua Tengah. Kinerja yang optimal dari APIP akan berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Faktor-faktor pendukung yang mencakup kecukupan anggaran, SDM yang memadai, sarana dan prasarana, komitmen pimpinan, serta fasilitas dan tunjangan yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Faktor-faktor penghambat kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, seperti kurangnya kompetensi SDM, budaya organisasi yang tidak mendukung, motivasi yang rendah, dan keterbatasan jumlah auditor, sangat mempengaruhi kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Artinah, Budi. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Melalui Audit Berbasis Risiko (ABR) Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Mencapai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Studi Kasus pada Inspektorat Kota Banjarbaru. *Jurnal Akuntansi*, 10 (2).

Damopolii, Regina Veranty. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan

- kesehatan masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1168.
- Fauzi, Achmad. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10(2).
- Firmansyah, Habib. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–11.
- Ibrahim, Andi Sopian, & Idris, Idris. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 116–125.
- Idana, Ghita Annafi, Lestari, Ramadhani Kembang Arum, Mandalika, Theophilus Gilbert Hasian Andriyan, & Putri, Dhika Maha. (2022). Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Kasus Bansos COVID-19. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(6).
- Irawan, Andri. (2018). Sistem pelayanan publik berbasis E-government pada pemerintah daerah kabupaten merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1), 20–37.
- Mangallo, Erwin, & Lambe, Kristian H. P. (2025). Efektivitas tugas dan fungsi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di inspektorat provinsi papua tengah. *Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.
- Masdan, Susan Rabbany, Ilat, Ventje, & Pontoh, Winston. (2017). Analisis kendala-kendala peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat kabupaten gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Oktafien, Shinta, & Yuniarsih, Tjutju. (2018). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Komunikasi Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Pnsd Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Studi Pada Pnsd Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 20(2), 1–16.
- Putri Yulawati, dkk. (2022). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. *The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology*. Retrieved from <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>.
- Ramadhani, Nabila Putri, Lituhayu, Dyah, & Widowati, Nina. (2024). ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PADA KANTOR DESA SUMBERJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG. *NOVA IDEA*, 1(3), 18–33.